



KEMENKO
KUMHAM
IMIPAS

B.J. HABIBIE MEMORIAL LECTURE TAHUN 2026

*ETIKA PERADABAN DALAM MEMBANGUN MASA DEPAN BANGSA
MEMBACA ULANG PEMIKIRAN FILOSOFIS
M. NATSIR DAN CITA-CITA B.J. HABIBIE*

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.A., M.Soc.Sc., Ph.D.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,
Imigrasi, dan Pemasysaran Republik Indonesia





MENGAPA M. NATSIR DAN B.J. HABIBIE PERLU DIBACA KEMBALI?



Mengenang tokoh besar tidak cukup dengan menjadikannya mitos atau ikon yang dipuja, namun tidak dipahami.



Pemikiran dan perjuangan mereka perlu dihadirkan kembali melalui telaah yang kritis, sehingga kita dapat memahami kekuatan, kelemahan, serta relevansi bagi zaman sekarang.



Mempelajari masa lalu bukan berarti hidup di dalam masa lalu. Sejarah memberikan pelajaran untuk memahami bagaimana bangsa ini terbentuk, menghadapi berbagai persoalan, dan bagaimana kita dapat membaca kemungkinan masa depan.

**Mengenang bukan sekadar mengagumi,
tetapi memahami dan mengambil hikmah.**





M. NATSIR & B.J. HABIBIE

DUA JALAN MENUJU MASA DEPAN BANGSA

M. NATSIR ETIKA PERADABAN



- ✓ Amanah
- ✓ Keadilan
- ✓ Musyawarah
- ✓ Pembatasan Kekuasaan
- ✓ Pertanggungjawaban



MASA DEPAN
INDONESIA

TRANSFORMASI



- ✓ Ilmu Pengetahuan
- ✓ Teknologi
- ✓ Sumber Daya Manusia
- ✓ Industrialisasi
- ✓ Inovasi dan Kemandirian

M. Natsir memberikan arah etis, sementara B.J. Habibie membangun kemampuan untuk bergerak. Masa depan Indonesia membutuhkan keduanya secara bersamaan



M. NATSIR: KEKUATAN HARUS MEMILIKI ARAH ETIS

Bagi M. Natsir, persoalan utama bukanlah seberapa religius nama suatu negara, melainkan sejauh mana kekuasaan dijalankan dengan tanggung jawab moral.

Agama tidak harus dipahami sebagai katalog teknis yang menyediakan jawaban untuk setiap desain kelembagaan. Agama memberikan horizon nilai yang menjadi arah penggunaan kekuasaan.

KEADILAN

Keluasan tidak boleh menjadi alat dominasi.

KEMASLAHATAN

Tujuan negara adalah menghadirkan kehidupan yang baik bagi masyarakat.

PEMBATASAN KEKUASAAN

Kekuasaan harus dibatasi oleh hukum, opini publik, dan mekanisme koreksi.

ETIKA

Memberikan arah

AMANAH

kekuasaan adalah tanggung jawab. Bukan sekadar hak.

MUSYAWARAH

Keputusan publik harus membuka ruang bagi partisipasi & pertimbangan bersama.

Konstitusi dan hukum adalah instrumen,
etika memberikan arah penggunaannya.



DEMOKRASI BUKAN SEKADAR MENGHITUNG SUARA

Dalam Pemikiran M. Natsir, Demokrasi Tidak Berhenti Pada Mekanisme Pemilihan dan Penghitungan Suara. Demokrasi Harus Menjadi Cara Hidup, Yang di Dalamnya Kekuasaan Selalu Terbuka Untuk Dikritik dan Dibatasi.



1

LEGITIMASI

Kekuasaan merupakan amanah dan memperoleh persetujuan rakyat.



2

KEADILAN

Kekuasaan dijalankan berdasarkan keadilan, musyawarah dan kemaslahatan.



3

ETIKA PUBLIK

Agama menjadi sumber etika, bukan alat untuk mendominasi.



4

PEMBATASAN KEKUASAAN

Hukum, kritik, oposisi, dan mekanisme koreksi menjaga agar kekerasan tidak berjalan tanpa batas.



5

PERTANGGUNG-JAWABAN

Penguasa bertanggung jawab kepada rakyat sekaligus kepada Tuhan.



B.J. HABIBIE:

TEKNOLOGI BUKAN SEKADAR PRODUK, TETAPI KEMAMPUAN BANGSA

Bagi B.J. Habibie, menguasai teknologi tidak berarti sekadar membeli mesin atau mendatangkan teknologi dari negara lain. Transfer teknologi baru mempunyai arti apabila menghasilkan kapabilitas nyata di dalam negeri dan menciptakan nilai tambah.

PERTANYAAN B.J. HABIBIE ?
Setelah teknologi didatangkan, apa yang sekarang dapat kita lakukan sendiri yang sebelumnya tidak dapat kita lakukan?

Tujuan akhir bukan sekadar memiliki produk teknologi, tetapi memiliki **manusia, pengetahuan, keterampilan, industri, dan kemampuan riset** yang tetap berada di Indonesia.



PROSES MEMBANGUN KEDAULATAN KEMAMPUAN



• **MENGGUNAKAN**



• **MEMAHAMI**



• **MENGUASAI**



• **MENGEMBANGKAN**



• **MENCIPTAKAN**



PESAWAT TERBANG HANYALAH “ALAT” MEMBANGUN KEMAMPUAN

Keterikatan B.J. Habibie terhadap teknologi tinggi tidak berhenti pada penciptaan sebuah produk, Industri penerbangan membutuhkan:

ILMU
PENGETAHUAN



TENAGA
AHLI



KETELITIAN
PRODUKSI



PENGUASAAN
TEKNOLOGI KOMPLEKS



DISIPLIN
TERHADAP STANDAR



KERJA SAMA
LINTAS KEAHLIAN



UKURAN KEBERHASILAN BUKAN HANYA :



Berapa hanya pesawat yang berhasil dibuat?

TETAPI :



Berapa banyak pengetahuan, tenaga ahli, keterampilan industri, dan kemampuan teknologi yang berhasil kita bangun dan pertahankan di dalam negeri?



B.J. HABIBIE DAN REFORMASI

KETIKA ENGINEERING BERTEMU KONSTITUSIONALISME

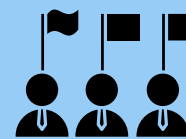
B.J. Habibie memasuki kursi kepresidenan dalam situasi krisis ekonomi belum pulih, kepercayaan publik melemah, dan tuntutan perubahan politik datang hampir bersamaan.

Dalam masa pemerintahanya yang relatif singkat, ruang politik dibuka melalui berbagai perubahan:



- **KEBEBASAN PERS**

Ruang kritik dan informasi diperluas.



- **PARTAI POLITIK**

Kompetisi politik kembali dibuka.



- **PEMILU 1999**

Pemilu dimajukan dari 2003 menjadi 1999



- **OTONOMI DAERAH**

Disentralisasi mulai diperkuat.



- **HUKUM DAN HAM**

Lahir berbagai perangkat hukum baru yang menopang Reformasi.

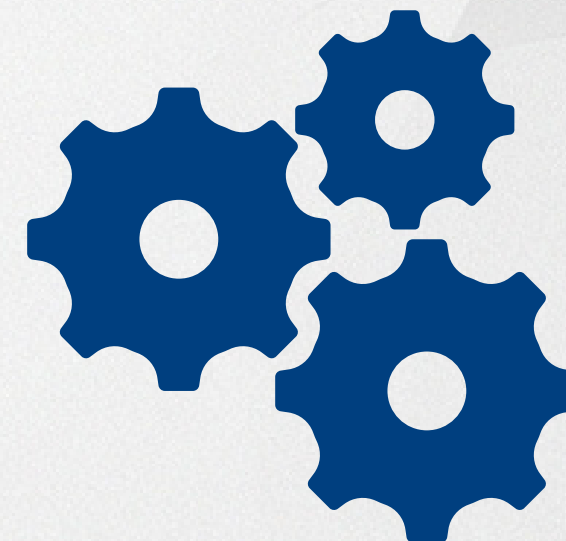
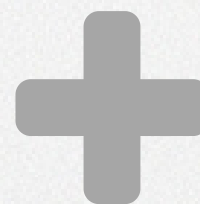
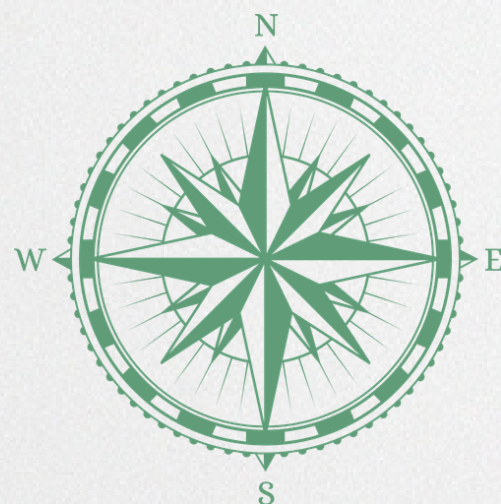
B.J. Habibie menyebut pendekatannya sebagai **“evolusi yang dipercepat”** perubahan harus cepat, tetapi tetap dilakukan melalui aturan dan desain kelembagaan.



DUA WARISAN, SATU MASALAH PERADABAN

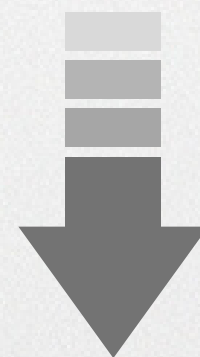
KOMPAS M. NATSIR

Mengajarkan bahwa kemampuan dan kekuatan harus memiliki arah, batas, etika, dan pertanggungjawaban.



B.J. HABIBIE MESIN

Mengajarkan bahwa cita-cita bangsa membutuhkan ilmu pengetahuan, teknologi, sumber daya manusia, industri, dan, kemampuan nyata.



KOMPAS TANPA MESIN

Kita memiliki arah, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mencapainya.

MESIN TANPA KOMPAS

Kita memiliki kemampuan yang besar, tetapi berisiko bergerak menuju arah yang salah.



KARAKTER + KEMAMPUAN



ETIKA + ILMU PENGETAHUAN

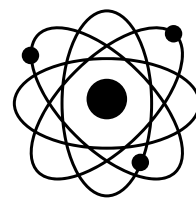


KEKUATAN UNTUK BERTINDAK + KEMAMPUAN UNTUK MENAHAN DIRI



LIMA AGENDA ETIKA PERADABAN MENUJU 2045

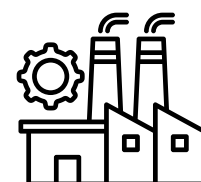
1



KUASAI ILMU PENGETAHUAN

Universitas, lembaga penelitian, pemerintah, dan industri harus membangun ekosistem pengetahuan yang saling mendukung.

2



BANGUN KEMAMPUAN INDUSTRI NASIONAL

Hilirisasi dan transfer teknologi harus menghasilkan keterampilan, teknologi, industri pendukung, dan kekayaan intelektual di dalam negeri.

3



PELIHARA DEMOKRASI SEBAGAI MEKANISME KOREKSI

Media, parlemen, peradilan, masyarakat sipil, akademisi, penghormatan terhadap perbedaan, dan hubungan negara dengan warga.

4



INTERNALISASI PANCASILA

Pancasila harus hadir dalam praktik; keadilan, kesempatan yang layak, penghormatan terhadap perbedaan, dan hubungan negara dengan warga.

5



HUKUM HARUS ADAPTIF TERHADAP TEKNOLOGI

AI, bioteknologi, siber, dan inovasi baru membutuhkan hukum yang memahami, teknologi, melindungi masyarakat, sekaligus tidak mematikan inovasi.

BANGSA YANG MAMPU, BANGSA YANG TAHU BATAS.

Kemajuan membutuhkan dua hal sekaligus, kemampuan untuk melakukan tindakan dan pertimbangan tentang bagaimana tindakan itu seharusnya dilakukan.



KEMENKO
KUMHAM
IMIPAS

TERIMA KASIH

“Dalam sistem yang baik orang buruk akan dipaksa jadi orang baik. Sebaliknya, dalam sistem yang buruk orang baik akan terpaksa jadi orang buruk”

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.A., M.Soc.Sc., Ph.D.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,
Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

